

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya, didapat kesimpulan yaitu :

1. Tingkat Ketimpangan Kawasan Barat Indonesia rata-rata tahun 2017-2022 sebesar 0,69 masuk dalam golongan ketimpangan tinggi yang menjadikan Kawasan Barat mempunyai Ketimpangan yang lebih tinggi dari Kawasan Timur. Provinsi Bangka Belitung mempunyai ketimpangan yang lebih rendah dengan nilai ketimpangan rata-rata sebesar 0.20. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan ketimpangan paling tinggi dengan nilai ketimpangan rata-rata sebesar 0.98. Provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah yakni provinsi Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung juga Bali. Provinsi yang masuk dalam ketimpangan sedang adalah provinsi Aceh, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi yakni provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga Banten.  
Ketimpangan pendapatan di Kawasan barat pada tahun 2017-2022 masih sangat timpang yakni sebesar 0,32. Provinsi dengan ketimpangan paling rendah ada di provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung sebesar 0.03 dan paling tinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau rata-rata sebesar 0.54.
2. Tingkat Ketimpangan di Kawasan Timur selama tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 0,68 masuk dalam golongan ketimpangan tinggi. provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah yakni provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, juga Sulawesi Barat, selanjutnya provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang yakni provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi yakni provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat juga Papua.

Pada Kawasan Timur Indonesia provinsi Papua mempunyai taraf ketimpangan yang paling tinggi dengan rata-rata sebesar 1.86. sementara itu provinsi dengan tingkat ketimpangan yang paling rendah yakni provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata sebesar 0.16. ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur masih terjadi sebesar 0,21. Ketimpangan tertinggi diduduki oleh provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rata-rata 0,44. Selanjutnya ketimpangan paling rendah diduduki oleh provinsi Kalimantan Barat sebesar 0.03 dapat dikatakan jika pendapatan di Kawasan Timur masih sangat timpang.

3. Provinsi Indonesia mayoritas masuk dalam kategori kuadran III dan kuadran IV, yakni Provinsi berkembang cepat serta provinsi relatif tertinggal selama tahun 2017-2022. Dengan melihat kedua kurva kuznets tersebut, kurva hubungan indeks wiliamson dan pertumbuhan ekonomi dan kurva hubungan indeks theil dan pertumbuhan ekonomi keduanya menggambarkan bentuk “U terbalik”. Dapat disimpulkan jika Kuznets berlaku untuk Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

## **1.2. SARAN**

Sebagai upaya meminimalisir ketimpangan pembangunan Kawasan Barat juga Kawasan Timur Indonesia, beberapa saran diberikan yaitu :

1. Dalam meminimalisir tingkat ketimpangan pembangunan antar Kawasan Barat juga Kawasan Timur, pemerintah perlu memperhatikan setiap daerah tidak hanya daerah pusat saja namun yang lebih penting memperhatikan daerah yang tertinggal sehingga pembangunan merata. Dengan melihat potensi pada tiap daerah sehingga dapat dikelola dengan baik dan menimbulkan kenaikan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menyurutkan tingkat ketimpangan pembangunan sebaiknya pemerintah merancang langkah rencana pembangunan lebih tepat sasaran juga efektif selama pemecahan masalah ketimpangan dan kemiskinan, bukan saja menargetkan pertumbuhan ekonomi yang naik tetapi dapat dirasakan kalangan penduduk menengah keatas saja

3. Pemerintah daerah seharusnya tidak terpusat untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi ,meningkat dengan selang waktu cepat sebab tanpa disertai usaha pemerataan dan keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan yang tidak berkualitas menjadi sangat rentan dan memperluas ketimpangan pembangunan ekonomi. Kemajuan kegiatan ekonomi ditetapkan dari mutu sumber daya manusia yang mengelola. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemusatan pembangunan sumberdaya manusia melalui sisi pendidikan, kesehatan juga distribusi pendapatan terkhusus daerah terbelakang juga sedang berkembang. pembangunan manusia yang naik dapat berimpak positif untuk daya serap sumber daya manusia yang bernilai seperti sumberdaya manusia yang berkualitas, berpendidikan juga terampil hingga mendukung pertumbuhan ekonomi dari nilai tambah output yang meningkat.